

ANALISIS TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA PROYEK RENOVASI RUMAH DINAS KANTOR PELAYAN PAJAK DI KABUPATEN SIKKA

*Triapriyono Kaidu¹, Anastasia M.N. Soludale²

^{1,2}Teknik, Nusa Nipa, Maumere

*) Email: kaidutriapriyono@gmail.com,

ABSTRACT

The main objective of this study is to analyze the domestic components in the renovation project of the KPP Pratama Maumere official residence. Domestic components are a strategic government policy based on several perspectives. Specifically, this policy is implemented to encourage demand for domestic products and labor, as well as to strengthen the local economic base. This study uses a quantitative descriptive approach to evaluate quantitative data related to the components of materials, labor, and services used in this project. The results of the study show that the final Domestic Component Level (TKDN) value in the renovation project of the KPP Pratama Maumere official residence, impacted by the use of local materials, reached 70.40%. This means that the project has met the minimum TKDN threshold of 35%. Therefore, there is no need for evaluation or financial sanctions, which are only applied if the project fails to meet the established minimum TKDN threshold. The results indicate that the material components have the most significant influence on the final TKDN value in this project. This emphasizes the importance of utilizing local resources in construction projects.

Keyword: TKDN, Renovation project, Materials, Labor, Sikka Regency

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis komponen dalam negeri dalam proyek renovasi rumah dinas KPP Pratama Maumere. Komponen dalam negeri merupakan kebijakan strategis pemerintah yang didasarkan pada beberapa perspektif. Secara spesifik, kebijakan ini diimplementasikan untuk mendorong permintaan terhadap produk dan tenaga kerja dalam negeri serta memperkuat basis ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengevaluasi data kuantitatif terkait komponen material, tenaga kerja, dan jasa yang digunakan dalam proyek ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase nilai akhir TKDN pada proyek renovasi Rumah Dinas KPP Pratama Maumere memiliki dampak dari material lokal yang digunakan mencapai sebesar 70,40%, yang berarti proyek tersebut telah memenuhi batas minimum TKDN sebesar 35%. Dengan demikian, tidak perlukan evaluasi atau sanksi finansial, yang hanya diterapkan jika proyek gagal memenuhi batas minimum TKDN yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian, komponen bahan material terbukti memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap nilai akhir TKDN pada proyek ini. Hal ini menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal dalam proyek konstruksi.

Kata kunci: TKDN, Proyek renovasi, Material, Tenaga kerja, Kabupaten Sikka

1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan serta penguatan industri dalam negeri, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN. Kebijakan TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011 yang menguraikan tentang perhitungan dan pokok-pokok peraturan teknis [1]. Kebijakan TKDN bertujuan untuk mendorong pemanfaatan produk lokal dalam proyek-proyek pemerintah, dengan harapan dapat memperkuat industri dalam negeri, membuka peluang kerja, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor [2]. Menurut Susanti [3] tujuan dari TKDN antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan daya saing industri lokal. Pada sektor konstruksi, penerapan TKDN menjadi hal yang sangat penting. Sektor ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sumber Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa kontribusi sektor konstruksi diperkirakan hampir 10,65% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2023 [4]. Dalam sektor konstruksi, penerapan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) seringkali menjadi tantangan, terutama pada proyek-proyek renovasi yang melibatkan berbagai elemen seperti bahan bangunan, peralatan, dan tenaga kerja. Salah satu contoh yang menarik untuk dianalisis adalah proyek renovasi rumah dinas Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Sikka. Proyek ini tidak hanya berfokus pada renovasi fisik bangunan, tetapi juga memberikan ruang bagi integrasi berbagai komponen lokal dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan, jasa konstruksi, dan teknologi pendukung semuanya melibatkan elemen-elemen yang berasal dari dalam negeri, mendukung kebijakan TKDN dengan cara yang aplikatif dan efektif. Hal ini tidak hanya memperkuat perekonomian lokal, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pengembangan sektor konstruksi di daerah tersebut.

Kabupaten Sikka tertetak di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti pasir, batu dan juga tenaga kerja. Namun, tingkat pemanfaatannya dalam proyek-proyek konstruksi seringkali belum maksimal. Proyek renovasi rumah KPP di Kabupaten Sikka menjadikan analisis mengenai seberapa jauh potensi lokal dapat dipadukan dalam kegiatan pembangunan, dan pada saat yang sama, mendukung kebijakan nasional yang berkaitan dengan TKDN.

Renovasi rumah negara KPP di Kabupaten Sikka merupakan salah satu rehab yang diharapkan dapat menyerap semaksimal mungkin penggunaan TKDN. Renovasi ini akan dilakukan guna peningkatan fasilitas negara yang mendukung pegawai pemerintah, terutama di bidang perpajakan. "Proyek pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk lokal yang memenuhi syarat kualitas dan harga yang kompetitif," bunyi Pasal 64 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 [5] tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah untuk mendukung produk lokal dalam setiap proyek strategis, termasuk proyek konstruksi.

Namun, pelaksanaan TKDN dalam proyek pembangunan sering tersendat kendala. Salah satu sumber utama adalah ketidaktersediaan bahan lokal yang sesuai dengan standar kualitas tertentu. Berbagai studi terdahulu yang dilakukan Hidayat et al.[6] kebijakan TKDN memiliki potensi besar untuk meningkatkan industri lokal, tetapi banyak tantangan yang menghalanginya untuk dilaksanakan. Dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas produk domestik, serta pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku pengadaan. Namun, pelaku pengadaan kurang memahami dan mematuhi peraturan TKDN, yang dapat menghambat keberhasilan kebijakan [7].

Kabupaten Sikka, lokasi proyek renovasi rumah negara, menyimpan potensi besar untuk mendukung penerapan TKDN. Daerah ini kaya akan sumber daya alam sebagai bahan bangunan seperti pasir, batu, kayu dan lainnya. Selain itu, Kabupaten Sikka juga memiliki banyak tenaga kerja lokal yang akan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan proyek. "Pemberdayaan sumber daya lokal dalam proyek-proyek pemerintah tidak hanya menambah angka kontribusi terhadap TKDN namun juga berimbas langsung kepada masyarakat", ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sikka dalam laporan tahunan 2023[8].

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar tingkat TKDN pada proyek renovasi rumah negara Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Sikka. Penelitian ini berfokus pada identifikasi komponen lokal yang digunakan, proporsi kontribusi komponen lokal terhadap keseluruhan proyek

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menganalisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek renovasi rumah Dinas KPP di kabupaten Sikka. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menghitung persentase tingkat komponen yang digunakan secara lokal. Berikut metode penelitian dijelaskan secara rinci:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen rencana kerja dan syarat (RKS), dokumen *detail engineering desin* (DED), yang berisi rancangan mencakup informasi tenaga kerja dan bahan proyek serta harga satuan pekerjaan yang digunakan & juga rencana anggaran biaya (RAB) sebagai perhitungan biaya keseluruhan.
2. Mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam analisis Tingkat komponen Dalam Negeri (TKDN), terdapat beberapa aspek utama, yaitu bahan material, tenaga kerja, dan alat kerja yang digunakan. Ketiga komponen ini dianalisis secara rinci sesuai dengan item pekerjaan yang tercantum dalam pelaksanaan proyek renovasi rumah Dinas KPP di Kabupaten Sikka.
 - a. Bahan material yang digunakan, dengan memastikan proposi bahan lokal sesuai dengan standar TKDN. Pengidentifikasi mencakup jenis bahan, sumber pengadaan dan kontribusi terhadap komponen lokal.
 - b. Analisis Tenaga kerja mencakup jumlah, kualifikasi, dan asal tenaga kerja yang terlibat dalam proyek, dengan keterlibatan tenaga kerja lokal sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekitar.
 - c. Peninjauan alat kerja mencakup jenis peralatan yang digunakan, alat produksinya, serta kontribusinya terhadap nilai TKDN. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan alat mendukung capaian target komponen lokal.
3. Proses identifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencakup semua komponen utama yang berkontribusi terhadap pelaksanaan proyek. Komponen-komponen ini meliputi tenaga material, tenaga kerja, dan alat kerja yang masing-masingnya dianalisis berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku.

- a. Semua bahan material digunakan dalam proyek diidentifikasi dengan mengacu pada daftar inventarisasi Kementerian perindustrian. Daftar ini mencantumkan jenis bahan material yang memenuhi syarat sebagai produk lokal, termasuk tingkat kandungan lokal dan persentase kontribusi terhadap nilai TKDN.
 - b. Identifikasi tenaga kerja dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah, kualifikasi, dan proposi tenaga kerja lokal yang terlibat. Penilaian ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2011, yang mengatur metode perhitungan dan proposi tenaga kerja dalam nilai TKDN.
 - c. Analisis alat kerja melibatkan pengkajian asal dan jenis peralatan yang digunakan, termasuk apakah alat tersebut merupakan produk lokal atau impor. Perhitungan kontribusi alat kerja terhadap TKDN juga dilakukan berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 16/M-IND/PER/2/2011.
4. Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) setiap item pekerjaan dilakukan untuk menghitung biaya rincian yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek, dengan mempertimbangkan koefisien pengali dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek renovasi rumah dinas KPP di Kabupaten Sikka.
 5. Rekapitulasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilakukan untuk menghitung nilai akhir TKDN pada proyek Renovasi Rumah Dinas KPP di Kabupaten Sikka. Proses ini mencakup pengumpulan dan perhitungan seluruh nilai TKDN dari setiap item pekerjaan dalam proyek. Setiap item pekerjaan dianalisis berdasarkan proposi bahan material, tenaga kerja, dan alat kerja lokal yang digunakan. Nilai TKDN masing-masing item kemudian dijumlahkan dengan mempertimbangkan bobot atau kontribusinya terhadap total pekerjaan. Hasil akhir rekapitulasi ini menjadi nilai TKDN keseluruhan proyek, yang mencerminkan sejauh mana proyek memenuhi ketentuan penggunaan komponen lokal sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan perhitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada sebuah proyek, terdapat komponen penting seperti bahan material, tenaga kerja dan alat kerja, yang masing-masing memiliki peran krusial dalam menentukan kontribusi terhadap nilai TKDN. selain itu, untuk memperoleh estimasi yang lebih baik, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap harga satuan pekerjaan (AHPS) untuk setiap item pekerjaan yang terlibat, yang akan mencakup perhitungan biaya bahan, tenaga kerja, serta penggunaan alat kerja yang digunakan dalam proyek renovasi rumah dinas KPP di Kabupaten Sikka analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) untuk masing-masing item pekerjaan dalam proyek renovasi rumah Dinas KPP di kabupaten Sikka.

Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Sebelum menghitung TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) bahan material, langkah pertama adalah mengidentifikasi daftar bahan material yang akan digunakan dalam proyek renovasi rumah Dinas KPP di Kabupaten Sikka. Selanjutnya, nilai TKDN dari masing-masing bahan material perlu ditentukan. Perhitungan nilai TKDN dapat dilakukan menggunakan persamaan atau merujuk pada daftar inventarisasi yang disediakan oleh menteri perindustrian, termasuk informasi yang tersedia di situs web resmi kementerian <https://tkdn.kemenperin.go.id/>.

Tabel 1. Contoh perhitungan bahan material Cat Tembok

No	Uraian	Satuan Produk (%)		Total
		KDN	KLN	
I	Tenaga Kerja			
	Pekerja	100	-	100
	Tukang Cat	100	-	100
	Kepala tukang	100	-	100
	Mandor	100	-	100
II	Bahan material			
	Plamir Tembok	62.34	37,66	100
	Cat Tembok/ Cat Dasar	70.28	29.72	100
	Cat Penutup Tembok	70.28	29.72	100
III	Alat Kerja			
	-	-	-	-
	Persentase Produksi	602,90	59,44	700
	%TKDN Bahan Material		86.13	

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2024)

Contoh perhitungan TKDN material cat tembok dijelaskan pada tabel diatas. Seluruh tenaga kerja yang digunakan merupakan komponen dalam negeri (KDN). Artinya, 100% pekerja, tukang cat, kepala tukang, dan mandor berasal dari dalam negeri. Tidak ada keterlibatan komponen luar negeri (KLN) dalam aspek tenaga kerja. Untuk bahan material ada pemerataan KDN dan KLN. Untuk plamir tembok, kontribusi KDN 62,34%, sedangkan KLN 37,66%. Cat tembok atau cat dasar, lebih tinggi lagi ada pada KDN, yaitu 70,28%, dari KLN sebesar 29,72%. Cat penutup tembok menunjukkan pola yang sama seperti cat dasar, yaitu 70,28% dari KDN dan 29,72% dari KLN. Dengan kata lain, ini merujuk pada ketergantungan tertentu pada bahan impor meskipun bahan material utama sebagian besar berasal dari dalam negeri. Total 700%. Penghitungan ini memperlihatkan besaran kontribusi dalam tenaga kerja dan bahan material terhadap proses produksi. Selain itu, TKDN dalam bahan material diklaim 86,13%, menjadikan porsi yang paling banyak dalam pemakaian bahan material dari dalam negeri.

$$\begin{aligned} \% \text{TKDN} &= \frac{\text{Komponen Dalam Negeri}}{\text{Total Komponen}} \times 100\% & (1) \\ &= \frac{602,90}{700} \times 100\% \\ &= 86,13\% \end{aligned}$$

Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dengan AHPS

Perhitungan TKDN Proyek renovasi rumah Dinas KPP di Kabupaten Sikka dimulai dengan menentukan komponen-komponen utama nilai TKDN. Komponen-komponen tersebut meliputi seperti material bahan, tenaga kerja, dan alat kerja. Proses identifikasi ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana setiap elemen pekerjaan mendukung lokalisasi input guna menghasilkan kualitas TKDN yang terukur. Renovasi rumah Dinas KPP di kabupaten Sikka merupakan salah satu contoh konstruksi yang dapat dibagi menjadi subpekerjaan dengan kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Setiap subpekerjaan memerlukan analisis kasus per kasus terhadap bahan, tenaga kerja, dan peralatan yang digunakan. Beberapa subpekerjaan dari proyek ini meliputi:

1. SMKK & Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Galian Tanah
3. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
4. Pekerjaan Atap & Plafon
5. Pekerjaan Penutup Lantai & Dinding
6. Pengerjaan Pengecatan
7. Pekerjaan Penggantungan & Pengunci
8. Pekerjaan Listrik
9. Pekerjaan Instalasi air & Sanitasi

Setiap item pekerjaan dilakukan analisis harga satuan pekerjaan untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan (HPS). AHPS terdiri dari beberapa komponen, seperti material bahan, tenaga kerja, dan alat yang digunakan. Nilai TKDN masing-masing dari masing-masing komponen tersebut akan digunakan menghitung biaya komponen dalam negeri (KDN) dari semua item pekerjaan.

Tabel 2. Contoh perhitungan analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) dengan TKDN

No	Uraian	Koef.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	TKDN (%)	Biaya KDN (Rp)
	A	B	C	d = b x c	e	f = d x e
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	0,2500	70.000,00	17.500	100	17.500,00
	Tukang	0,0833	100.000,00	8.330	100	8.330,00
	Kepala Tukang	0,0083	110.000,00	913	100	913,00
	Mandor	0,0028	120.000,00	336	100	336,00
	Jumlah Harga (Rp)			27.079,00		27.079,00
B	BAHAN					
	Keramik 60 x60	2,9170	27.895,00	81.370,00	70,40	57.284,28
	Semen Portland	13,6320	1.733,00	23.671,00	83,74	19.777,24
	Pasir Pasang	0,0270	209.160,00	5.647,00	100	5.647,32
	Semen Warna	1,5000	17.955,00	26.933,00	52,75	14.206,89
	Jumlah Harga		137.567,00			96.915,74

No	Uraian	Koef.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	TKDN (%)	Biaya KDN (Rp)
C	ALAT KERJA					
	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total			164.646,00		123.994,74
	Overheat & Profit 13%			21.404,00		16.119,32
	Harga Satuan Pekerjaan			186.050,00		140.114,05
	TKDN (%)				75,31	

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2024)

Berdasarkan tabel 2 diatas menjelaskan biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan jumlah pekerja yang dipakai, upah per hari, dan kontribusi tenaga kerja dalam negeri (TKDN). ada empat jenis tenaga kerjayang dihitung yaitu: pekerja, tukang, kepala tukang dan mandor. Semua kontribusi (TKDN) untuk tenaga kerja adalah 100%, yang berarti seluruh biaya tenaga kerja berasal dari dalam negeri. Total biaya tenaga kerja sebesar Rp. 27,079,00, dengan biaya TKDN yang sama yaitu Rp. 27.079,00.

Sedangkan untuk bahan yang digunakan meliputi keramik 60 x60, semen portland, pasir pasang, dan semen warna. Setiap bahan memiliki TKDN yang berbeda, seperti:

1. Keramik 60 x 60 nilai yang memiliki nilai TKDN terdapat pada *website* Kemertian Perindustrian sebesar 70,40% dengan biaya KDN Rp. 57.284,28 dari Rp. 81.370,00.
2. Semen portlan nilai TKDN terdapat pada *website* Kemertian Perindustrian sebesar 83,74% dengan biaya KDN Rp. 19.777,24 dari Rp. 23.671,00.
3. Pasir pasang nilai TKDN terdapat pada *website* Kemertian Perindustrian sebesar 100% dengan biaya KDN Rp. 5.647,32
4. Semen warna nilai TKDN terdapat pada *website* Kemertian Perindustrian sebesar 52,75% dengan biaya KDN Rp. 14.206,89 dari Rp. 26.933,00.

Total biaya bahan adalah Rp. 137.567,00 dengan biaya TKDN sebesar Rp. 96.915,74. Total biaya keseluruhan pekerjaan (enaga kerja dan bahan) adalah sebesar Rp. 164.646,00. Setelah ditambahkan biaya *overheat* dan profit 13% atau sebesar Rp. 21.404,00, haraga satuan pekerjaan pemasangan 1 m² keramik 60 x 60 menjadi Rp. 186.050,00. Dari total biaya tersebut, kontribusi TKDN adalah Rp. 140.114,05, dengan persentase TKDN 75,31%

$$\begin{aligned} \% \text{TKDN} &= \frac{\text{Biaya Komponen Dalam Negeri}}{\text{Biaya Total Komponen}} \times 100\% & (2) \\ &= \frac{140.114,05}{186.050,00} \times 100\% \\ &= 75,31\% \end{aligned}$$

Rekapitulasi Nilai TKDN

Tabel 3. Rekapitulasi Nilai TKDN Proyek Renovasi Rumah Dinas KPP di Kabupaten Sikka

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)	Biaya KDN	TKDN (%)
1	SMKK & Pekerjaan Persiapan	64.025.418,54	60.706.455,06	94,82
2	Pekerjaan Galian Tanah	390.166,40	390.166,40	100,00
3	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela	50.982.478,13	30.947.816,96	60,70
4	Pekerjaan Atap & Plafon	145.826.981,01	84.948.559,26	58,25
5	Pekerjaan Penutup Lantai & Dinding	39.662.712,06	31.304.290,14	78,93
6	Pengerjaan Pengecatan	35.945.921,29	24.797.816,56	68,99
7	Pekerjaan Penggantung & Pengunci	12.257.699,86	10.585.103,01	86,35
8	Pekerjaan Listrik	15.082.588,67	11.078.802,89	73,45
9	Pekerjaan Instalasi air & Sanitasi	50.700.470,63	37.308.025,73	73,59
	TKDN Proyek	414.874.436,58	292.067.036,01	70,40

Sumber: hasil pengolahan data (2024)

Berdasarkan tabel 3 yang disajikan, dapat dilihat bahwa proyek renovasi rumah dinas KPP di Kabupaten Sikka memiliki komponen yang sebagian besar menggunakan bahan dan jasa lokal, sebagaimana tercermin pada tingkat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang cukup tinggi. Proyek ini menunjukkan dominasi komponen dalam negeri dengan rata-rata TKDN sebesar 70,40%, yang berarti lebih dari setengah biaya proyek berasal dari produk dan tenaga kerja lokal. Beberapa item pekerjaan memiliki persentase yang sangat tinggi, seperti pekerjaan

galian tanah yang mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh biaya pekerjaan berasal dari sumber dalam negeri. Hal ini mencerminkan ketergantungan penuh pada material dan jasa lokal untuk pekerjaan ini.

Selain itu, pekerjaan SMKK dan persiapan juga menunjukkan tingkat TKDN yang sangat tinggi, yaitu 94,84%, mengindikasikan bahwa hampir seluruh biaya untuk pekerjaan ini menggunakan komponen lokal. Pekerjaan lainnya seperti pekerjaan penggantung dan pengunci dan penutup lantai dan dinding memiliki tingkat TKDN yang cukup tinggi, masing-masing 86,35% dan 78,93%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar biaya berasal dari produk lokal.

Namun, beberapa pekerjaan tertentu seperti pekerjaan atap dan plafon dan pekerjaan kusen pintu dan jendela menunjukkan persentase TKDN yang lebih rendah, masing-masing 58,25% dan 60,70%. Hal ini menunjukkan ketergantungan pada impor dalam kategori pekerjaan tersebut, meskipun sebagian besar biaya masih berasal dari komponen dalam negeri.

Pekerjaan listrik dan instalasi air dan sanitasi memiliki TKDN yang relatif baik, yakni masing-masing 73,45% dan 73,59%, yang berarti sebagian besar bahan dan tenaga kerja yang digunakan berasal dari dalam negeri, namun masih ada sedikit ketergantungan pada produk impor.

Secara keseluruhan, proyek ini berhasil mencapai 70,40% TKDN, yang menunjukkan bahwa proyek ini cukup komitmen dalam menggunakan komponen dalam negeri. Hal ini tentu saja memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, karena sebagian besar biaya proyek beredar dalam negeri, mendukung industri dan tenaga kerja lokal.

Batas Minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan terkait tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), salah satu melalui keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KPTS/M/2023 [9] mengenai batas minimum nilai TKDN untuk jasa konstruksi. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan bahwa proyek konstruksi untuk pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana harus memenuhi batas minimum TKDN sebesar 35%. Pada studi kasus proyek renovasi Rumah Dinas KPP di Kabupaten Sikka, nilai TKDN sebesar 70,40%, yang berarti proyek tersebut telah memenuhi syarat minimum TKDN dan tidak memerlukan evaluasi lebih lanjut atau sanksi finansial. Evaluasi dan sanksi finansial hanya diberlakukan apabila suatu proyek gagal memenuhi batas minimum TKDN yang ditetapkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap proyek Rumah Dinas KPP di Kabupaten Sikka, dapat disimpulkan bahwa proyek ini berhasil memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 602/KPTS/M/2023 menetapkan batas minimum TKDN sebesar 35% untuk proyek konstruksi pembangunan, rehabilitasi, dan rekonstruksi sarana infrastruktur. Proyek ini berhasil mencapai nilai TKDN sebesar 70,40%, yang tidak hanya memenuhi syarat minimum, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian setempat. Ini tercermin dari penggunaan bahan dan tenaga kerja dalam negeri yang cukup besar. Meskipun beberapa bagian pekerjaan, seperti atap dan plafon, memiliki TKDN yang lebih rendah, secara keseluruhan proyek ini berhasil meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberi beberapa saran, yaitu:

1. Penelitian lanjutan dapat mengidentifikasi lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan material lokal hingga mencapai persentase signifikan (70,40%). Ini dapat mencakup analisis ketersediaan material lokal, harga kualitas, serta kebijakan pengadaan.
2. Untuk pemerintah Kabupaten Sikka perlu konsisten dalam meningkatkan penggunaan material lokal dalam pembangunan sarana prasarana maupun pembangunan infrastruktur

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Perindustrian. (2011). *Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN*. Jakarta: Kemenperin.

- [2] Nurliyanti, V., Anggono, T., Romandhi, Q., Astrini, N., & Irsyad, M. I. Al. (2022). Survey-based Policies to Integrate Local Lamp Manufacturer Interests and Energy Efficiency in Indonesia. *IEEE Xplore*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1109/EPEC56903.2022.10000131>
- [3] Susanti, I. (2016). Evaluasi Kualitas Layanan Jasa Sertifikasi Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) di PT. Sucofindo (Persero). *Jurnal PASTI*, 10(1), 87–97.
- [4] Badan Pusat Statistit. (2023). *Kontribusi Sektor Konstruksi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- [5] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>
- [6] Hidayat, T., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2024). Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan , Kebudayaan , Riset , dan Teknologi : Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)*, 12(1), 85–94
- [7] Anindya, J. P., Hafid Aditya Pradesa, Adhika Bergi Nugroho, & Wijayant, R. (2023). Formulasi Strategi Pengembangan Bisnis Vaksin Virus (Studi Kasus di PT. Bio Farma Bandung). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5324–5337. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2567>
- [8] Laporan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sikka. (2023). Pemberdayaan Sumber Daya Lokal di Kabupaten Sikka.
- [9] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.602/KPTS/M/2023 tentang Batasan Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi.